29

PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN YANG BERWAWASAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Dudung Darusman
(Dekan dan Lektor Madya Ekonomi Sumberdaya Hutan, Fahutan IPB)

Disampaikan pada Diskusi Terbatas Pemukiman Masyarakat Perambah Hutan, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Jakarta 4 Mei 1993

I. LANDASAN PEMIKIRAN

1. Peladangan yang merupakan wujud umum dari kegiatan perambahan hutan, dan seringkali dikaitkan dengan permasalahan tradisi masyarakat, sesungguhnya tidak dapat terus dipertahankan, atau dibiarkan sebagaimana adanya, dalam konteks perkembangan masyarakat sekarang. Unsur-unsur ekosistem, yang mendukung keseimbangan sistem peladangan tradisional pada kenyataannya secara dinamis telah dan terus mengalami perubahan. Pertambahan jumlah penduduk atau manusia peladang itu sendiri dan penyempitan wilayah peladangan telah semakin mengurangi atau meniadakan kemungkinan akan tercapainya keseimbangan ekosistem dari peladangan tradisional, yang dicirikan oleh kerusakan ekosistem yang semakin parah.

2. Apabila peladangan yang terjadi sekarang di kebanyakan tempat dibiarkan terus berlanjut, maka di satu pihak akan terjadi perusakan sumberdaya, khususnya hutan, yang dari sudut kepentingan lokal, nasional, dan internasional akan menimbulkan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan lingkungan, yang kemudian akan mengancam pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan itu sendiri. Sementara di lain pihak, sistem peladangan yang tidak seimbang secara ekosistem akan meyebabkan terjadinya proses pemiskinan masyarakat peladang sendiri akibat terjadinya degradasi daya dukung ekosistemnya.

3. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia perlu terus mendorong agar masyarakat peladang atau perambah hutan dapat berkembang lebih maju, sesuai dengan tantangan-tantangan baru, untuk mencapai keseimbangan-keseimbangan ekosistem baru yang semakin mensejahterakan. Kemajuan kesejahteraan yang dimaksud harus mengandung arti peningkatan absolut serta peningkatan relatif terhadap kemajuan kelompok masyarakat pendatang disekitarnya, khususnya dalam kegiatan kehutanan (HPH, Industri Perkayuan, dsb). Setiap upaya Pemerintah untuk mendorong kemajuan masyarakat perambah hutan haruslah berorientasi pada peningkatan kemampuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya.

II. PEMAHAMAN MASALAH

1. Masalah pembangunan masyarakat sekitar hutan, yang pada umumnya bersifat tradisional (dan taat terhadap norma dan nilai tradisional tersebut) memerlukan pemahaman yang seksama dan mendalam tentang kondisi dan dinamika sosial-ekonomi-budaya setempat, termasuk pola kehidupan dan mata pencahariannya. Proses pembangunan diharapkan akan lebih lancar (efektif dan efisien) dan berkelanjutan apabila menggunakan rekayasa pembangunan yang memperhatikan dan memanfaatkan segala potensi dinamis yang ada pada masyarakat setempat tersebut. Rekayasa pembangunan yang memanfaatkan dan menyalurkan potensi-potensi dari dalam tersebut akan bersifat hemat dan menghindarkan *"cultural shock"*.

2. Untuk itu terlebih dahulu perlu diidentifikasi dan dipelajari kondisi dan dinamika dari parameter-parameter sosial-ekonomi-budaya masyarakat setempat. Parameter-parameter tersebut sekurang-kurangnya mencakup :

   a. Struktur mata pencaharian dan struktur pendapatan
   b. Struktur pendidikan dan keterampilan
   c. Kegiatan ekonomi dan sosial yang terkait dengan sumberdaya hutan dan kegiatan kehutanan, serta
   d. Motivasi kegiatan-kegiatan tersebut pada (c), baik yang menyangkut motivasi ekonomi, sosial (norma, nilai), politik dan agama, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mengganggu/merusak sumberdaya hutan dan kehutanan.

   Kemudian dari padanya digali dan dikenali sumber atau inti rekayasa pembangunan yang akan diterapkan.

3. Rekayasa kegiatan pembangunan atau kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan, yang didasarkan pada pemahaman permasalahan di atas, hendaknya dapat memenuhi kriteria-kriteria sabagai berikut :

   a. Ada atau sudah dikenal masyarakat, sehingga segera dapat berjalan dengan lancar, karena sejalan dengan dinamika sosial-ekonomi-budaya setempat.
   b. Mempunyai potensi sumber-sumber produksi yang memadai, atau kalaupun belum memadai sumber-sumber tersebut masih dapat dikembangkan.
   c. Mempunyai potensi pasar yang memadai atau dapat dikembangkan.
   d. Sejalan dengan kepentingan pelestarian sumberdaya, khususnya sumberdaya hutan dan pelestarian lingkungan hidup setempat.
   e. Sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan berbagai kepentingan hubungan internasional.

4. Rekayasa pembangunan yang datang dari luar sistem setempat sesungguhnya masih tetap diperlukan, yakni dalam rangka mengarahkan pembangunan lokal tersebut agar sejalan dan searah dengan tujuan-tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan, terutama yang menyangkut tujuan yang mendasar yakni mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional. Masyarakat yang dibiarkan murni tradisional seringkali menjadi cenderung lemah dalam menghadapi tekanan dan invasi ekonomi-sosial-budaya dari luar yang bermaksud mengeksploitasinya.

III. KONSEP DAN LINGKUP PROGRAM PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN

1. Perlu ditekankan bahwa kegiatan merambah hutan dilakukan bukan untuk mencari rumah/pemukinan, tapi untuk mendapatkan mata pencaharian yang lebih baik dari apa yang dimiliki sebelumnya. Jadi konsep pemukiman perambah hutan hendaknya bukan hanya menyediakan rumah tempat tinggal (*resetlement*), atau juga mengajak/merubah pola bertani menjadi menetap (*non-resetlement*), tapi secara prinsip harus lebih luas lagi, yakni menyediakan tempat mukim dalam rangka menunjang mata pencaharian yang lebih baik. Dengan kata lain inti atau fokus permasalahannya adalah mendapatkan mata pencaharian yang secara kuantitatif dan kualitatif lebih baik/maju.

2. Oleh karena itu, pemukinan perambah hutan hendaknya merupakan "konsep paket", yang didalamnya berisikan berbagai upaya pemantapan/peningkatan mata pencaharian/penghidupan yang dianggap baik, sesuai dengan tujuan-tujuan, serta sesuai pula dengan kemampuan setempat. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam upaya pemukiman perambah hutan telah dirumuskan dengan baik dalam Draft Dua Rencana Kerja Penanganan Pemukiman Perambah Hutan (Puslitbang Transmigrasi dan PPH), namun dengan susunan yang saya coba sempurnakan urutannya sebagai berikut :

   (1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat perambah hutan melalui penyaluran dan pembinaan potensi dan motivasi yang mereka milik.
   (2) Mencegah pemborosan dan perusakan sumberdaya alam, khususnya hutan, tanah dan air.
   (3) Menjaga kelestarian hutan agar tetap dapat memenuhi fungsinya.

   Dengan konsep paket tersebut, program pemukiman perambah hutan adalah upaya penataan pemukinan yang dapat memudahkan masyarakat untuk menumbuh-kembangkan lapangan usaha atau mata pencaharian yang ada, yang sejalan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya.

   Dari sisi pandang lain, pemukinan perambah hutan adalah upaya untuk menciptakan keterbukaan ekonomi lokal yang subsisten menjadi ekonomi pasar yang bertumbuh-kembang, yang disusun oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang sejalan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, serta menekan/meniadakan pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut.

3. Lingkup program pemukiman perambah hutan, yang didasarkan pada penumbuh-kembangan mata pencaharian masyarakatnya, dapat meliputi pengembangan mata pencaharian yang secara tradisional telah berada di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan pengusahaan hutan, dan pengembangan mata pencaharian baru yang berkaitan dengan kegiatan pengusahaan hutan, yang umumnya tidak bersifat tradisional. Dapat dikemukakan contoh data/informasi hasil penelitian ***Inoue*** (1987-1989) tentang struktur dan sumber-sumber pendapatan masyarakat peladang/perambah hutan di seluruh wilayah Kalimantan Timur, dalam tabel berikut.

Table 12. *Source of Income (%)*

Village	Agriculture Income				Income Relating to Forest					Others			Total
	Rice	Live-stock	Others	Total	Hunting	Rattan	Aloe-wood	Hand-craft	Total	Gold	Paid-labor	Total	
(The Punan)													
Nahas Sebanung	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*75,0*	*23,0*	*0,0*	*98,0*	*2,0*	*0,0*	*2,0*	*100,0*
Long Melay	*24,0*	*3,0*	*0,2*	*27,2*	*0,0*	*20,0*	*24,0*	*9,0*	*53,0*	*0,0*	*19,8*	*19,8*	*100,0*
(The Kenyah)													
Long Betoah	*28,0*	*1,0*	*0,0*	*29,0*	*17,0*	*0,0*	*5,0*	*37,0*	*59,0*	*0,0*	*12,0*	*12,0*	*100,0*
Long Ampung	*79,0*	*5,0*	*3,0*	*87,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*1,0*	*7,0*	*100,0*
Datah Bilang	*35,0*	*0,6*	*0,0*	*35,6*	*0,0*	*4,0*	*8,0*	*2,0*	*14,0*	*11,0*	*39,4*	*50,4*	*100,0*
Rantau Sentosa	*58,0*	*0,0*	*7,0*	*65,0*	*0,5*	*0,0*	*26,0*	*0,5*	*27,0*	*4,0*	*4,0*	*8,0*	*100,0*
Gemar Baru	*39,0*	*1,0*	*1,0*	*41,0*	*0,1*	*0,0*	*18,0*	*0,1*	*18,2*	*25,0*	*15,8*	*40,8*	*100,0*
Karang Mumus	*36,0*	*1,0*	*40,0*	*77,0*	*1,0*	*0,0*	*0,0*	*4,0*	*5,0*	*1,0*	*17,0*	*18,0*	*100,0*
(The Benuaq)													
Besiq	*36,0*	*0,2*	*0,0*	*36,2*	*10,0*	*36,0*	*0,0*	*0,0*	*46,0*	*0,3*	*17,5*	*19,8*	*100,0*
Jengan Danum	*50,0*	*4,0*	*0,0*	*54,0*	*0,2*	*24,0*	*0,0*	*0,2*	*24,4*	*0,0*	*21,6*	*21,6*	*100,0*
(The Buginese)													
Karya Baru	*13,0*	*1,0*	*81,0*	*95,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*5,0*	*5,0*	*100,0*
(The Javanese)													
Bukit Raya	*39,0*	*22,0*	*2,0*	*63,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*2,0*	*2,0*	*0,0*	*35,0*	*35,0*	*100,0*

Sumber *: Makato Inoue (1989). Swidden Cultivation in East Kalimantan. The Tropical Rain Forest Research Project JTA (a) – 137, Japan International Cooperation Agency. Jakarta.*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa paket kegiatan pemukiman perambah hutan diberbagai tempat hendaknya berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Misalnya, untuk Desa Nahas Sebanung dan Long Melay (Suku Dayak Punan) sebaiknya pemukiman diarahkan untuk menunjang pengembangan pemungutan dan kerajinan rotan dan hasil hutan non-kayu lainnya. Demikian pula di Desa Long Betaoh, Suku Dayak Kenyah, sementara itu di Desa Long Ampung ditujukan untuk menunjang pengembangan pertanian padi/pangan dan peternakan. Demikianlah seterusnya dapat digali untuk wilayah-wilayah lainnya.

Perlu diingat bahwa contoh kesimpulan tersebut baru didasarkan pada penelaahan kondisi struktur mata pencaharian dan pendapatannya saja, dan masih perlu ditelaah lagi dari kondisi parameter-parameter lainnya untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut dapat pula digali mata pencaharian yang mulai dan dapat terus dikembangkan, yang berkaitan dengan kegiatan pengusahaan hutan, baik sebagai penyedia input (*backward linkages*), maupun pengguna (sebahagian) output (*forward linkages*). Sebagai penyedia input dapat berupa : tenaga kerja (buruh, teknisi, manajer), penyedia keperluan makanan, penyedia benih dan bibit tanaman kehutanan, dan lain-lain. Sedangkan sebagai pengguna output dapat berupa : pengrajin yang memanfaatkan sebahagian/limbah kayu, baik untuk membuat peralatan maupun cinderamata, dan lain-lain.

4. Perlu ditambahkan bahwa dalam paket pemukiman perambah hutan tersebut, pihak Pemerintah dan swasta dalam keadaan-keadaan tertentu perlu bertindak sebagai pembina sumberdaya dan proses produksi serta sumberdaya manusianya, sebagai ayah-angkat, sebagai penyalur input dan output dari dan ke pasar, dan sebagainya.

IV. IMPLEMENTASI

Pada dasarnya proses pembangunan itu dari waktu ke waktu semakin memerlukan pemahaman dan penanganan yang semakin teliti dan seksama, yang mungkin sekali karena pemahaman dan penanganan pada tingkat garis besarnya telah berhasil dilaksanakan (justru bukan karena gagal), dan tinggallah penanganan tingkat yang lebih detail yang sudah pasti semakin menjelimet dan beragam.

Mungkin sekali kita keliru, apabila beranggapan bahwa semakin hari perhatian kita terhadap tugas dan pekerjaan kita dapat semakin longgar. Sesungguhnya, dengan berbekal pengalaman yang semakin lengkap kita diharapkan dapat semakin mantap dan kreatif dalam menghadapi tugas dan pekerjaan tahap berikutnya yang semakin detail dan beragam dan sangat kondisional tersebut.

Perlu selalu diingat bahwa tugas kita, terutama para sarjana, baik di kantor maupun lapangan, adalah selalu menciptakan rekayasa-rekayasa baru yang kreatif (sesuai dengan bidang keahliannya) yang dapat memecahkan permasalahan yang bersifat kondisional, agar penanganan masalah tersebut efisien, dalam keterbatasan-keterbatasan (*constraints*) yang ada.

Dengan rekayasa-rekayasa ciptaannya itu, pemecahan masalah yang bersifat lebih detail, beragam dan kondisional tersebut tidaklah harus menjadi lebih berat dan mewegahkan. Rasa berat dan wegah sebetulnya berasal dari niat dan kemampuan diri yang kurang mantap, bukan dari hakikat pekerjaannya itu sendiri.

Dalam implementasi (termasuk perencanaan) dari konsep program pemukiman perambah hutan yang berwawasan pembangunan lebih luas seperti diuraikan di atas, serta untuk membantu kemantapan dan kreativitas serta komitmen para pelaksananya di lapangan, kiranya diperlukan penelaahan/studi yang seksama per wilayah pemukiman perambah hutan oleh para ahli yang terkait.

Demikianlah hal-hal yang dapat saya kemukakan sebagai wujud dukungan dan peran serta saya dalam diskusi terbatas Pemukiman Masyarakat Perambah Hutan ini.